

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.Ap) Pada Administrasi Negara
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH:
ARYA RISKALNI
10975007011

PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1434 H/2013 M

Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Abstrak

Oleh

Arya Riska Alni

Penelitian ini dilaksanakan kepada masyarakat di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Adapun tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga (KK) yang menjadi Wajib Pajak yang ada di wilayah Kecamatan Rambah Hilir. Mengingat jumlah populasi terlalu banyak, maka teknik penarikan sampelnya digunakan secara Cluster Sampling yaitu suatu teknik sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti sangat luas, karena desa-desa di Kecamatan Rambah Hilir berstrata (tidak sama). Maka pengambilan sampelnya menggunakan Stratified Random Sampling, yaitu suatu teknik yang digunakan apabila populasi mempunyai unsur/ anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional, sebesar 10% dari keseluruhan Wajib Pajak. Dalam pengambilan data, menggunakan data primer dan sekunder yang dilakukan secara observasi, wawancara, dan penyebaran angket kepada responden, selanjutnya data tersebut di analisis secara deskriptif kualitatif lalu disusun dan dihubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan kemudian diambil dari kesimpulan. Dari pengolahan data yang dilakukan dapat disimpulkan dalam partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah Hilir cukup baik yaitu sebagian besar responden 67 dari seluruh masyarakat yang terwakili (responden) sebagai subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah pembayar pajak setia. Baiknya masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah Hilir itu tidak terlepas dari kesadaran masyarakat itu sendiri bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan hal yang wajib dibayar tiap tahunnya dan kesesuaian antara luas tanah dan bangunan yang dimiliki dengan jumlah yang harus dibayar serta pelayanan yang baik dan manfaat yang dirasakan dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri. Di samping itu responden juga sudah menyediakan anggaran setiap tahunnya yang dipotong oleh kelompok tani masing-masing responden dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	9
 BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Pengertian Partisipasi	11
B. Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar PBB	20
C. Pengertian PBB	22
D. Defenisi Pajak Menurut Islam.....	30
E. Pajak Dalam Pandangan Islam.....	32
F. Klasifikasi Pajak.....	36
G. Objek dan Subjek PBB	38
H. Dasar Hukum Pengenaan PBB.....	41
I. Prosedur Pemungutan PBB	42
J. Tarif PBB	55
K. Definisi Konsep.....	57
L. Teknik Pengukuran	58
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	62
B. Populasi dan Sampel	62
C. Jenis dan Sumber Data	64
D. Teknik Pengumpulan Data.....	64
E. Analisa Data	65
 BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Karakteristik Wilayah	66
B. Keadaan Demografi	66
C. Struktur Pemerintahan.....	73
 BAB V HASIL PENELITIAN	
A. Identitas Responden	79
B. Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar PBB.....	83

C. Usaha-Usaha Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membayar PBB di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu	91
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Target dan Realisasi Penerimaan PBB Pedesaan dan Perkotaan	64
Tabel I.2	Realisasi Penerimaan PBB Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 Menurut Kecamatan.....	65
Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Rambah Hilir	66
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kecamatan Rambah Hilir	67
Tabel IV.3	Jumlah Sarana Pendidikan Di Kecamatan Rambah Hilir	67
Tabel IV.4	Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian di Kecamatan Rambah Hilir	68
Tabel IV.5	Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Rambah Hilir	68
Tabel IV.6	Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Rambah Hilir	69
Tabel V.1	Keadaan Tingkat Pendidikan Responden Penelitian di Kecamatan Rambah Hilir	70
Tabel V.2	Keadaan Kelompok Umur Responden Penelitian di Kecamatan Rambah Hilir	70
Tabel V.3	Jenis Pekerjaan Responden Penelitian di Kecamatan Rambah Hilir	
Tabel V.4	Jumlah Responden yang Membayar PBB di Kecamatan Rambah Hilir Tahun 2010-2012.....	
Tabel V.5	Jumlah Penunggakan Pembayaran PBB oleh Responden di Kecamatan Rambah Hilir Tahun 2010-2012.....	
Tabel V.6	Tingkat Disiplin Responden Membayar PBB di Kecamatan Rambah Hilir	
Tabel V.7	Tingkat Pelayanan Pembayaran PBB	
Tabel V.8	Frekuensi Penyuluhan PBB di Kecamatan Rambah Hilir	
Tabel V.9	Jawaban Responden Tentang Manfaat PBB Bagi Masyarakat di Kecamatan Rambah Hilir	
Tabel V.10	Jawaban Responden Tentang Pengaruh Jarak Tempat Tinggal di Kecamatan Rambah Hilir.....	

Tabel V.11 Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Undang-Undang yang Mengatur PBB di Kecamatan Rambah Hilir...

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Sudah merupakan suatu kenyataan bahwa dalam pembangunan nasional pemerintah melaksanakan pembangunan disegala aspek kehidupan, baik itu aspek politik, sosial budaya, ekonomi maupun pertahanan dan keamanan. Aspek ini bertujuan untuk membina usaha yang terus menerus yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada alenia keempat, yaitu: “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Pembangunan tidak pernah berhenti dilaksanakan baik dinegara maju, Negara sedang berkembang, maupun Negara terbelakang sekalipun. Indonesia sebagai salah satu Negara yang sedang berkembang yang juga menyelenggarakan kegiatan pembangunan nasional secara bertahap dalam usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan pancasila.

(Sondang P. Siagian 4:2000) Yang dimaksud dengan pembangunan disini ialah sebagaimana yang dikemukakan oleh S.P Siagian dalam bukunya “adminsitrasi pembangunan” yaitu “rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan

dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara, bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*). Banyak cara yang digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia tentu saja membutuhkan dana atau pembiayaan yang sangat besar jumlahnya. Jika dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), pemasukan dana yang diterima oleh Negara diperoleh dari dua sumber yaitu penerimaan dari dalam negeri dan bantuan luar negeri. Penerimaan dari dalam negeri diperoleh dari sektor minyak dan gas (migas) dan dari sektor non migas (pajak dan non pajak). Sedangkan bentuk bantuan dari luar negeri adalah bantuan program dan bantuan proyek.

Sistem perpajakan yang terbaik dari sudut pandangan ilmu ekonomi adalah sistem perpajakan yang memiliki pengaruh-pengaruh ekonomi yang paling baik atau tidak-tidaknya memberikan pengaruh yang paling minimum.

Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi Negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan pendidikan, perekonomian, dan stabilitas politik sedangkan penerimaan di sektor migas sesuai dengan hukum alam jika dieksploitasi secara terus menerus cenderung akan berkurang dan nantinya akan habis. Bagaimanapun pajak dipungut tanpa terlalu

membebani rakyat dan adil dalam pelaksanaannya. Masalah perpajakan termaktub dalam pasal 2 ayat(2) UUD 1945 yang bunyinya: “pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-undang.”

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah primadona penerimaan Negara yang paling potensial. Penerimaan Negara dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana kepentingan umum. Dengan kata lain, pendapatan Negara dari sektor pajak merupakan “motor penggerak” kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi pemetintah untuk mampu menyediakan berbagai sarana ekonomi yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan nasional akan berhasil apabila kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat disuatu Negara. Jadi dalam pelaksanaannya pemerintah berusaha melibatkan seluruh rakyat dalam pembangunan tersebut.

Didalam menjalankan peran dibidang ekonomi pemerintah lebih harus menekankan adanya pengawasan yang arah kegiatan ekonomi bukan pada penguasa yang sebanyak mungkin untuk kegiatan tersebut. Pemerintah Indonesia tidak menghendaki terjadinya monopoli pasar, tetapi menghendaki terjadinya asas demokrasi yang sesuai dengan UUD 1945. Dan diharapkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang mengarah pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah.

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kenyataan bahwa kehidupan dan perekonomian bangsa Indonesia yang sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung yang memiliki peranan bagi kelangsungan hidup masyarakat, sehingga logis sekali jika mereka yang memperoleh manfaat kekayaan alam itu menyerahkan sebagian kenikmatan/keuntungan yang diperoleh kepada Negara melalui pembayaran pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan yang pada awalnya termasuk kedalam pajak negara kemudian dialihkan wewenangnya kepada pemerintah daerah yang termasuk pajak daerah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu cukup dapat diandalkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Rokan Hulu sehingga dapat meningkatkan kehidupan masyarakat.

Tabel 1.1 Target dan realisasi penerimaan PBB Pedesaan dan perkotaan

Kabupaten Rokan Hulu

No	Tahun	Target (dalam Rp)	Realisasi (dalamRp)	%
1	2010	353.258.592	131.740.398	37,29%
2	2011	378.203.331	131.808.259	34,85%
3	2012*	400.922.029	119.969.899	29,92%

*Keterangan : *) sampai bulan agustus 2012*

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten rokan Hulu tahun 2012

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sektor yang potensial yang bisa diandalkan untuk bisa menambah pemasukan bagi Kabupaten Rokan Hulu walaupun realisasi penerimaanya mengalami ketidak stabilan pendapatan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan pada tabel diatas yakni dengan adanya peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 3 tahun ini kontribusi Pajak Bumi dan bangunan masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan pada tahun 2012 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan malah mengalami penurunan yaitu hanya 29,92% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 34,85%.

Tabel 1.2: Realisasi Penerimaan PBB Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 Menurut Kecamatannya

No	Wilayah	Target	Realisasi	%
1	Tambusai	694,853,547	359,843,872	51,79%
2	Tambusai Utara	1,346,365,440	1,126,768,288	83,69%
3	Kepenuhan	577,517,280	345,681,361	59,86%
4	Kepenuhan Hulu	145,103,165	103,137,155	71,08%
5	Bangun Purba	225,775,482	106,182,308	47,03
6	Rambah	403,573,931	228,639,883	56,65%
7	Rambah Samo	411,528,950	130,639,883	31,82
8	Rambah Hilir	400.922.029	119.969.899	29,92%
9	Ujung Batu	248,387,936	108,893,222	43,84%
10	Kunto Darussalam	718,573,347	450,566,409	62,70%
11	Rokan IV Koto	337,582,900	90,073,214	26,68%
12	Pendalian IV Koto	265,048,179	174,326,546	65,77%
13	Tandun	571,003,005	237,702,153	41,63%
14	Kabun	199,397,105	110,045,603	55,19%
15	Bonai	449,611,595	280,038598	62,28%
16	Pagaran Tapah	251,916,388	146,020,291	57,96%
Jumlah		7.247.160.279	4.118.528.685	41,19%

Sumber : Kantor Dispenda Kabupaten Rokan Hulu tahun 2012

Kecamatan Rambah Hilir merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat bahwa Kecamatan Rambah Hilir adalah salah satu kecamatan yang cukup memberikan kontribusi yang besar dalam hal penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan namun pada realisasinya masih sangat kurang.

Dengan demikian dapat dipahami, penerimanaan negara maupun daerah tidak hanya berasal dari pihak pemerintah melalui sumber kekayaan alami, hasil

perusahaan negara/daerah atau pinjaman dan lainnya tetapi juga berasal dari partisipasi masyarakat berupa pajak-pajak yang harus dibayar sesuai peraturan yang berlaku.

Keberhasilan pemerintah nantinya dalam hal peningkatan penerimaan pajak ini berarti kita dapat membiayai segala kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, tanpa tergantung dari bantuan luar negeri lagi. Patut kita ketahui tingkat ketergantungan dengan luar negeri sangat besar. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya hutang luar negeri.

Supaya penerimaan pajak itu dapat berhasil dan dapat dijadikan sumber pemasukan negara serta setiap wajib pajak mau membayar, maka setiap orang harus mengerti tentang arti dan fungsi pajak itu sebenarnya. Tanpa adanya pengertian dari masyarakat mustahil akan terjadi peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak.

Pada saat sekarang ini masih cukup banyak masyarakat yang tidak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, mereka enggan memenuhi kewajiban yang sekali setahun itu. Penduduk atau rakyat harus sadar bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi Dan Bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk memperlancar roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat atau penduduk itu sendiri. Jadi sadar berkorban dan pengorbanan adalah untuk kepentingan nya sendiri dari generasi ke generasi.

Pendapatan daerah merupakan sumber dana yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan suatu pemerintah daerah. Kemampuan

pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah dilakukan dengan menggali sumber daya daerah, terutama dengan peningkatan sumber penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan yang merupakan sumber pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat. Untuk itu hendaknya sektor ini dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah dalam menciptakan kelangsungan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan isi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya peranan Dispenda tersebut diharapkan dapat ditingkatkannya sumber pendapatan daerah yang sesuai dengan otonomi daerah melalui penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan.

Oleh karena itulah, maka penulis ingin meneliti dan melihat keadaan yang sebenarnya dilapangan, untuk itu penulis mengambil judul; **“Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut “Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu ?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wahana untuk menambah dan mengembangkan wawasan dalam membuat karya ilmiah.
2. Untuk menambah referensi kepustakaan
3. Untuk menjadi masukan tempat atau objek penelitian
4. Bahan informasi bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Telaah Pustaka

Dalam bab ini berisikan telaah pustaka yang merupakan landasan teori yang menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu pengertian partisipasi masyarakat, Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, Defenisi pajak menurut syariah, Hubungan pajak dan syariat, Klasifikasi Pajak, Pajak dalam pandangan islam, Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan, Dasar Hukum

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, Tarif PBB,
Definisi Konsep.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukan penelitian. Seperti lokasi penelitian, karakteristik dan demografi.

BAB V : Analisis data

Dalam bab ini akan membahas hasil dari penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB VI : Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik kedepannya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Partisipasi

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Menurut Dr. Made Pidarta (Siti Irene Astuti Dwiningrum 2011:50), partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.

Partisipasi menurut Hunryar dan Hecman (dalam Siti Irne Astuti Dwiningrum 2011:51) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka.

(dalam Davis dan Newstrom 1985:179) Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong

mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab pencapaian tujuan itu.

Cohne dan Uphoff (dalam Siti Irne Astuti Dwiningrum 2011:51) berpendapat bahwa partisipasi adalah sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi program.

Sedangkan (dalam Seligman dan Edwin dalam Muhammad al amin 2003:9) menyatakan bahwa “ pengertian partisipasi adalah ikut sertanya suatu kesatuan untuk mengambil bagian dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh susunan kesatuan yang lebih besar”. Dari rumusan diatas dapat kita lihat bahwa partisipasi itu selalu dominan bahkan tidak dapat dipisahkan dalam segala kehidupan masyarakat ataupun kelompok masyarakat.

Sementara itu Katz (dalam Josef Riwu Kaho, 1988:113) menempatkan partisipasi sebagai salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan, di samping faktor-faktor tenaga terlatih, biaya, informasi, peralatan, dan kewenangan yang sah.

Partisipasi masyarakat, berarti masyarakat ikut serta yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta, karena anggapan bahwa hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan dan dibiayai utama oleh

pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak. (dalam Pasaribu dan Simanjuntak, 1986:345).

Partisipasi dapat dibagi dalam berbagai bentuk. Partisipasi menurut Effendi, terbagi atas partisipasi vertikal dan horizontal. Disebut vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Menurut Basrowi, partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu “partisipasi non fisik dan partisipasi fisik”. Partisipasi fisik adalah partisipasi (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, serta mendirikan dan menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk bantuan lainnya. Sedangkan partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Dalam partisipasi masyarakat terdapat dua dimensi penting. Dimensi pertama adalah siapa yang berpartisipasi dan bagaimana berlangsungnya partisipasi. Untuk itu Cohne dan Uphoff (dalam Josef Riwu Kaho, 1988:113) mengklasifikasikan masyarakat berdasarkan latar belakang dan tanggung jawabnya, yaitu:

1. Penduduk setempat
2. Pemimpin masyarakat.
3. Pegawai pemerintahan.
4. Pegawai asing yang mungkin dipertimbangkan memiliki peran penting dalam suatu atau kegiatan tertentu.

Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendorong partisipasi lokal kearah tercapainya program pemerintah:

1. Berorientasi kearah hubungan yang lebih efektif dengan masyarakat melalui pembangunan koalisi dan jaringan komunikasi.
2. Peningkatan rasa tanggung jawab masyarakat untuk pembangunan mereka sendiri dan peningkatan kesadaran mereka akan kebutuhan mereka, masalah mereka, kemampuan mereka dan potensi mereka.
3. Memperlancar komunikasi antar berbagai potensi lokal sehingga masing-masing dapat lebih menyadari perspektif partisipasi lain
4. Penerapan prinsip tertentu, yaitu tentang hidup, belajar merencanakan dan bekerja bersama-sama dengan rakyat.

Dimensi dua, bagaimana partisipasi itu berlangsung. Dimensi ini penting diperhatikan terutama untuk mengetahui hal-hal seperti:

1. Apakah inisiatif itu datang dari administrator ataukah dari masyarakat setempat.
2. Apakah dorongan partisipasi itu sukarela atau paksaan.
3. Saluran partisipasi itu apakah berlangsung dalam beris individu atau kolektif dalam organisasi formal ataukah informal dan apakah partisipasi itu secara langsung atau melibatkan wakil.
4. Durasi partisipasi
5. Ruang lingkup partisipasi, apakah sekali untuk seluruhnya, sementara atau berlanjut dan meluas.
6. Memberikan kekuasaan yang meliputi bagaimana keterlibatan efektif masyarakat dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan yang mengarah pada hasil yang diharapkan.

Masyarakat sendiri dapat berpartisipasi pada beberapa tahap, terutama dalam pembangunan, yakni: pada tahap inisiasi, legitimasi, dan eksekusi. atau seperti yang dirumuskan Bintoro Tjokroamidjojo (dalam Josef Riwu Kaho, 1988:133-114) “pertama keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut terdapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan. Kedua, adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara keadilan.”

Cohne dan Uphoff (dalam Josef Riwu Kaho, 1988:133-114) membedakan partisipasi menjadi empat jenis:

Pertama, partisipasi dalam pengemabilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Partisipasi masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan suatu program merupakan satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak lepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan *output*, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh.

Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Untuk lebih rincinya dalam hal partisipasi masyarakat dalam membangun, juga dirumuskan oleh para ahli lainnya seperti ; (Hanafiah dalam A. Sanit 1990:21) menjelaskan bahwa peran serta tidak hanya pengertian ditempat lokal seperti turut serta bersama atau individual dalam proyek pemerintah atau tidak hanya dalam hubungan produksi tetapi harus lebih luas. Peran serta harus meliputi segenap kehidupan masyarakat dalam segala bentuk melalui komunikasi sosial. Sementara (Raharjo dalam A.sanit 1990:23) mengemukakan bahwa partisipasi diartikan sebagai dana dan daya yang dapat disediakan sebagai proyek-proyek pemerintah.

Partisipasi masyarakat intinya ialah agar masyarakat umum atau sebanyak mungkin orang ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuannya guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan. Partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dari pembangunan. Masyarakat diharapkan ikut serta, karena anggapan bahwa hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan dan dibiayai terutama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak.

Elemen masyarakat merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi dalam program-program yang menyangkut dalam penerimaan dan keterlibatan manusia atau orang banyak. Dan kebanyakan program pembangunan menyangkut penerimaan dan keterlibatan orang banyak. Elemen masyarakat ini dapat bercorak pasif, orang tidak menolak suatu program pembangunan, atau bercorak aktif artinya orang tegas menerima dan bahkan aktif mengajak orang lain untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan hasil dari program yang dilancarkan karena berhasilnya program dirasakan masyarakat sebagai keberhasilan masyarakat sendiri.

Ada beberapa jenis partisipasi menurut (dalam Pasaribu dan Simanjuntak 1986, 349-352) yaitu:

1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam anjang sono, pertemuan atau rapat.
2. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
3. Partisipasi harta benda, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, serta pertolongan orang lain dan sebagainya.
4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.

5. Partisipasi “sosial” yang diberikan orang sebagai tanda kaguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, layad (dalam peristiwa kematian), kondangan, nyambungan, mulang-sambung.

Sedangkan (dalam Wahyudi Kumorotomo 2005:136-138) mengatakan partisipasi warga Negara dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu

1. Partisipasi dalam pemilihan (electoral participation)
2. Partisipasi kelompok (group participation)
3. Kontak antara warga Negara dan pemerintah (citizen-government contacting)
4. Partisipasi warga Negara secara langsung dilingkungan pemerintah.

Bagi setiap Negara demokratis, bagaimanapun akan melibatkan warganya dalam proses politik yang berlangsung. Hal ini setidaknya-dididirikan pada pertimbangan :

Pertama, kalau kita setuju bahwa aturan main politik yang memberi kesempatan pada “yang diperintah” untuk menentukan siapa “yang memerintah” dan untuk mempengaruhi tingkah lakunya dalam memerintah adalah aturan main yang menghormati harkat manusia, dan kalau kita setuju bahwa penghormatan dan peningkatan harkat manusia adalah inti masalah kualitas manusia, maka pembahasan peran serta masyarakat cukup gayuh.

Kedua, kenyataan bahwa setiap pemerintah dimanapun saja apapun corak ideologisnya dan bagaimanapun otoriternya, tidak bisa mengabaikan begitu saja

soal pemberian saluran bagi peran serta masyarakatnya. (dalam Josef riwu kaho, 2002:111-112)

Pada hakekatnya bahwa partisipasi itu adalah merupakan suatu keharusan yang merupakan suatu respon dari masyarakat dalam setiap pelaksanaan sebuah kebijakan, partisipasi masyarakat tersebut perlu didorong dengan beraneka ragam pendekatan. Secara umum jenis partisipasi yang ada dan tumbuh didalam masyarakat dapat kita lihat seperti :

1. Partisipasi dengan pikiran
2. Partisipasi tenaga
3. Partisipasi dengan keahlian
4. Partisipasi dengan uang
5. Partisipasi dengan jasa-jasa.

2.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pada hakikatnya partisipasi masyarakat itu adalah suatu keharusan yang merupakan suatu respon dari masyarakat dalam setiap pelaksanaan sebuah kebijakan. Adapun beberapa faktor-faktor lain yang sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak hal ini Pangabean (1998:43) menyatakan:

- a. tingkat pendidikan
- b. Tingkat Pendapatan
- c. Jarak tempat tinggal
- d. Sikap

e. Penyuluhan

Dalam hal ini penyuluhan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dan membuat wajib pajak menjadi mengerti akan fungsi dan arti pajak itu sebenarnya agar pendapatan dari sektor pajak menjadi optimal maka perlu sekali diadakan penyuluhan dari aparat perpajakan.

Adapun program penyuluhan adalah suatu pernyataan tertulis tentang keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan yang disusun secara sistematis (dalam Mardikanto:1997).

Sesuai uraian diatas penyuluhan merupakan suatu yang pokok yang dilaksanakan dalam mencapai suatu program. Penyuluhan dapat dikatakan salah satu ujung tombak dalam memberhasilkan suatu program. Hal itu sesuai pendapat Mardikanto (1997) bahwa sasaran penyuluhan dimaksudkan untuk mengubah dalam arti agar mereka memiliki dan dapat meningkatkan perilakunya mengenai sikap yang lebih progresif, pengetahuan yang luas dan kesadaran dalam kewajibannya sebagai wajib pajak.

Didalam literatur ilmu keuangan negara faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemasukan dana dari partisipasi masyarakat dengan membayar pajak ke kas negara adalah :

- a. Filsafat Negara
- b. Kejelasan Undang-Undang
- c. Tingkat pendidikan
- d. Kualitas dan Kuantitas Petugas pajak setempat

- e. Strategi yang diterapkan organisasi pajak di Indonesia.

2.3 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa untuk meningkatkan penerimaan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, maka telah disusun rencana pembiayaan tersebut dalam bentuk RAPBD setiap tahunnya dengan mengakumulasikan berbagai sumber pendapatan atau subsidi lainnya, apalagi daerah otonom yang dituntut kemampuannya untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri dengan modal pembiayaan sendiri pula.

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu ;

1. Pajak Negara

Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah :

a. Pajak penghasilan (PPh)

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang No.7 tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No.17 tahun 2000

b. Pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah (PPN dan PPn BM)

Dasar hukum pengenaan pajak PPN dan PPn BM adalah undang-undang No.8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No.18 tahun 2000

c. Bea materai

Dasar hukum pengenaan bea materai adalah undang-undang tahun
No.13 tahun 1985.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan.
- e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Pajak Parkir.
- h. Pajak Air Tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dilihat dari penjelasan diatas, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang pada awal adalah pajak Negara namun kemudian menjadi pajak daerah yang penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang dinikmati oleh pemerintah daerah.

Dapat ditegaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan menjadi sumber penerimaan pajak yang cukup besar jumlahnya serta sangat menunjang proses pembangunan nasional yang dirancang pemerintah, karena diketahui sebagian besar penduduk Indonesia dan masyarakat suatu daerah khususnya merupakan subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga memungkinkan sekali penerimaan sektor pajak ini terus ditingkatkan dalam menggalang sumber dana pembiayaan pembangunan.

Artinya pemerintah daerah harus senantiasa berupaya meningkatkan pembiayaan bagi daerahnya dengan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdapat didaerah, yang menurut pasal 157 UU No. 32 tahun 2004 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu:
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pajak menurut definisi para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang disetorkan sesuatu kepada Negara dengan ketentuan, tanpa mendapatkan kontraprestasi kembali dari Negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disuatu pihak dan untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh Negara.

Prof. PJA Adriani (dalam Mardiasmo, 2008:180) juga memberi definisi tentang pajak yaitu iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut pereturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditegaskan, pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh masyarakat (sebagai wajib pajak) kepada kas Negara atas jasa yang diberikan pemerintah dan sifatnya dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang penggunaannya diperuntukkan bagi membiayai rumah tangga pemerintah, pemerintah daerah, baik itu belanja rutin maupun pembangunannya.

Selain itu Sommrflld Ray M, Andrson Hrschlm & Brock Horac R (dalam Mardiasmo, 2008:179) berpendapat bahwa Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa

mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ada dua hal penting yang terdapat pada pengertian pajak tersebut yaitu:

1. Iuran yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut. Kalau rakyat atau badan hukum yang oleh pemerintah dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut (lazim disebut wajib pajak) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka wajib pajak yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau dengan perkataan lain wajib pajak tersebut dapat dipaksa oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan surat paksa dan sita.
2. Tanpa jasa timbal/ kontra prestasi/imbalan langsung, yang dapat ditunjukkan mengandung arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran kepada negara tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa yang diperolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut.

Dari berbagai definisi tersebut, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/ administrator pajak)
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Selain fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara / anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/ regulatif).

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditegaskan, pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh masyarakat (sebagai wajib pajak) kepada kas Negara atas jasa yang diberikan pemerintah dan sifatnya dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang penggunaannya diperuntukkan bagi membiayai rumah tangga pemerintah, pemerintah daerah, baik itu belanja rutin maupun pembangunannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang yang baru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

UU PDRD ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan pertimbangan beberapa hal tersebut diatas maka pada Undang-Undang No.28 tahun 2009 maka Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan dilimpahkan sepenuhnya ke daerah Kabupaten/Kota.

Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan dalam penyusunan UU ini, yaitu:

1. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional.
2. Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-undang (*Closed-List*).
3. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang.
4. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintahan daerah.
5. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif. Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan Pemerintah sebelum ditetapkan menjadi Perda. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan karena kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan atas bumi dan bangunan. Jadi jika ada seseorang yang mengaitkan bukti kepemilikan tanah dengan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), jelas kurang tepat, karena PBB bukan bukti hukum kepemilikan, hanya kewajiban pajak tanah dan bangunan, bagi siapa pun yang menempati per 1 Januari.

Berdasarkan UU No. 12 tahun 1985 yang telah di rubah menjadi UU No. 28 Tahun 2009, Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak pengairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak kebendaan atas bumi dan/atau bangunan dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau badan secara nyata mempunyai hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2.4 Defenisi Pajak Menurut Islam

Ada tiga ulama yang memberikan defenisi pajak, yaitu Yusuf Qardhawi, gazi inayah, dan abdul qadim zallum.

Yusuf Qardhawi, pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

Gazi Inayah, pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan sipemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

Abdul Qadim Zallum pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.

Dari defnisi yang dikemukakan oleh Abdul Qadim Zallum terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu:

1. Diwajibkan oleh Allah SWT.
2. Objeknya adalah harta (al-mal)
3. Subjeknya kaum muslim yang kaya (ghaniyyum), tidak termasuk non-muslim

4. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja.
5. Diberlakukannya karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh ulil amri.

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut sistem ekonomi islam, yaitu harus memenuhi empat unsur:

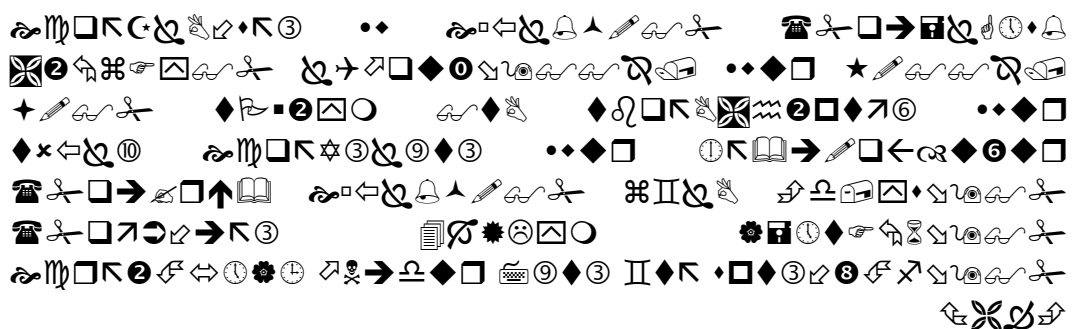
1. Harus adanya nash (al-qur'an dan hadist) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan non-muslim
3. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
4. Adanya tuntunan kemaslahatan umum.

2.5 Pajak Dalam Pandangan Islam

1. Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (mu'amalah), oleh sebab itu ia merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas oleh penguasa kepada rakyat (kaum muslim). Tanpa batasan syariat, pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati, dan menggunakannya menurut apa yang diinginkannya (pajak dianggap sebagai upeti- hak milik penuh sang raja).

2. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut syariat (apa yang telah ditetapkan Allah SWT, maka dia adalah zalim (QS. Al-Maidah 5:45).
3. Oleh karena pajak adalah bagian dari syariat, maka sebagai dari suatu pohon, ia harus memiliki akar yang kuat. Akar itu adalah iman atau aqidah. Hukum pajak mesti memiliki landasan/akar (dalil), yaitu al-qur'an dan hadits. Jika ia memiliki landasan Al-qur'an dan hadits, tentu ia akan memberi manfaat (buah), bagi kemaslahatan umat. Untuk itu Undang-undang pajak harus disusun hanya oleh orang yang beriman (mukmin) kepada Allah SWT, bukan oleh mereka yang dimurkai-Nya (nasrani) atau orang-orang yang sesat (yahudi), QS, Al-Baqarah 2:7).

Adapun mengenai pajak dalam islam dapat kita lihat dalam Al-quran surat al-Taubah ayat 29.



“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada

mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk”(At-Taubah:29).

[638] Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

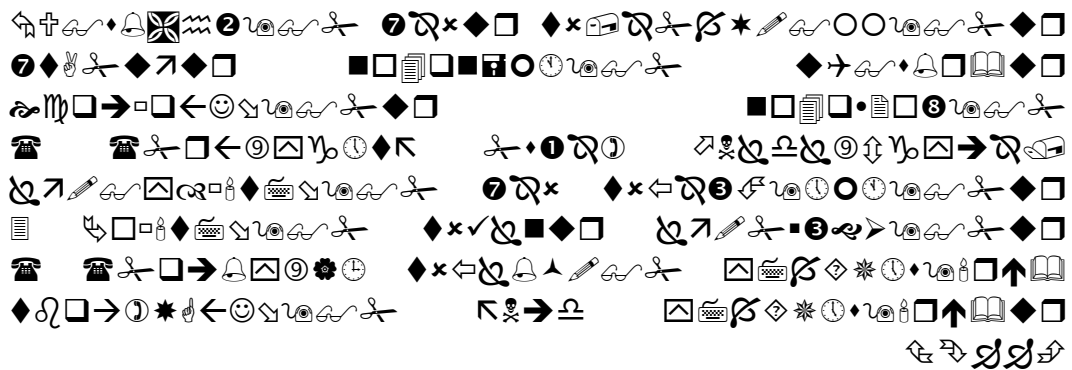
Adapun yang dimaksud dengan jizyah ialah pajak perkepala yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

Pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undangnya wajib ditunaikan oleh kaum muslimin selama itu untuk kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana, dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama. (dalam Didin Hafidhiddin 2002:61-63)

Ada beberapa alasan keharusan bagi kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan Negara, antara lain sebagai berikut :

Pertama, firman Allah SWT Surah Al-baqarah :177

[illegible]



“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa” (Al-Baqaran:177).

“Imam al-qurthubi ketika menafsir ayat ini dalam kalimat (... dan memberikan harta yang dicintai...) mengemukakan bahwa para ulama telah sepakat jika kaum muslimin khususnya, walaupun sudah menunaikan zakat tetapi memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan yang harus ditanggulangi, maka wajib mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut. Terkait dengan ayat ini, imam al-qurthubi juga mengemukakan sebuah hadits riwayat daruqthni dan Fatimah binti qayis, rasulullah SAW bersabda “sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain diluar zakat”.

Kedua, perintah dari ulil amri (pemerintah) wajib ditaati selama mereka menyuruh pada kebaikan dan ketaatan serta kemaslahatan bersama, Allah SWT berfirman dalam surat an-nisa ;59,



“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”(An-nisa:59).

Tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan nilia-nilai islam, maka tidak ada alasan bagi umat islam untuk membayar pajak.

Ketiga, solidaritas sosial dan tolong menolong diantara sesama kaum muslimin dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan taqwa.

2.6 Klasifikasi Pajak

Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang.

Faktor-faktor yang menentukan klasifikasi objek pajak :

1. Bumi/ Tanah
 - a. Letak
 - b. Peruntukkan
 - c. Pemanfaatan
 - d. Kondisi lingkungan
 - e. Dan lain-lain
2. Bangunan
 - a. Bahan bangunan
 - b. Rekayasa
 - c. Letak
 - d. Kondisi lingkungan
 - e. Dan lain-lain

Adapun klasifikasi pajak secara umum yaitu sebagai berikut ;

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : pajak penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh; Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya. Tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh ; Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang harus dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh; Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

- 1. Pajak provinsi, contoh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok.
- 2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.7 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan UU No.12 tahun 1985 yang telah di rubah menjadi UU No. 28 Tahun 2009, yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak pengairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan.

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olahraga;
- f. Galangan kapal, dermaga;

- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas,
pipa minyak; dan
- i. Menara.

Selain itu ada juga objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan menurut pasal 3 UU No.12 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994 dan kemudian dirubah lagi menjadi UU No.28 tahun 2009 yaitu sebagai berikut:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan, antara lain :
 - a. Dibidang ibadah
 - b. Dibidang kesehatan
 - c. Dibidang pendidikan
 - d. Dibidang sosial
 - e. Dibidang kebudayaan nasional
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalan yang disukai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

Sedangkan subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam kaitannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan maka yang dimaksud dengan subjek pajaknya adalah orang atau badan yang ;

1. Mempunyai hak atas bumi dan/atau
2. Memperoleh manfaat atas bumi dan/atau
3. Memiliki dan menguasai bangunan dan/atau
4. Memperoleh manfaat atas bangunan

Dengan demikian dapat ditegaskan, subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah pemilik bumi dan bangunan dalam pengertian UU No. 28 tahun 2009 dan objeknya adalah bangunan atau benda yang tidak bergerak.

2.8 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Adapun dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994 dan telah di ubah dengan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah kemudian diubah lagi menjadi UU No. 28 tahun 2009 .

2. Keputusan Menteri Keuangan No 201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian besarnya NJOPTKP sebagai dasar perhitungan PBB
3. Peraturan pemerintah No.25 tahun 2002 tentang penetapan besarnya nilai jual kena pajak untuk perhitungan PBB
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.03/2002 tentang perubahan atas keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK.04/2000 tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara pemerintah pusat dan daerah
5. Keputusan Menteri Keuangan No 1002/KMK .04/1985 tentang tata cara pendaftaran objek PBB
6. Keputusan Menteri Keuangan No 1006/KMK.04/1985 tentang tata cara penagihan PBB dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa.
7. Keputusan Menteri Keuangan No.1007/KMK.04/1985 tentang perlimpahan wewenang penagihan PBB kepada gubernur kepala daerah tingkat I dan/atau bupati/walikota madya kepala daerah tingkat II.
8. Keputusan Menteri Keuangan No.532/KMK.04/1998 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB.

2.9 Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai

pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Dimana bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan ekonomi sosial yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya dan memperoleh manfaat daripadanya, oleh karena itu wajar kiranya mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pajak.

2.9.1 Penyusunan Data Awal

Penyusunan data awal adalah semua kegiatan pendataan seluruh objek PBB dalam suatu wilayah tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan PBB atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

Dalam penyusunan data awal ini dicatat keterangan mengenai objek dan subjek PBB, termasuk dari nama, alamat dan dilengkapi dengan pengisian SPOP oleh wajib pajak dan dikembalikan kepada Dirjen Pajak. Wajib Pajak yang pernah dikenakan IPEDA tidak diwajibkan mendaftarkan objek pajaknya kecuali kalau ia menerima SPOP, maka dia wajib mengisinya dan mengembalikannya kepada Dirjen Pajak.

SPOP yang diterima harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan tepat waktu serta ditanda tangani dan di sampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Yang dimaksud

dengan jelas di sini adalah agar penulisan data yang diminta dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) di buat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan benar adalah data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan yang ada pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

2.9.2 Penetapan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan petugas akan ditentukan besarnya biaya kena pajak suatu objek pajak atau besarnya pajak terhutang. Besarnya pajak terhutang yang harus di bayar oleh wajib pajak juga tergantung kepada klasifikasi objek pajak yang dimilikinya. Untuk menentukan besarnya tarif pajak dipakai rumus $0,5\% \times 20\% \times \text{NJOP}$ (Nilai Jual Objek Pajak).

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah batas minimal Nilai Jual Objek Pajak yang menurut ketentuan Undang-Undang tidak dikenakan pajak. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No.12 tahun 1985 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 menyatakan bahwa besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOP TKP) adalah Rp 8.000.000 untuk setiap wajib pajak. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ini dirubah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 menjadi setinggi-tingginya Rp 12.000.000 untuk setiap wajib pajak.

2.9.3 Penerbitan dan Pengiriman SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang)

Dari Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dapat diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP). SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu wajib pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak.

Sedangkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dapat diterbitkan apabila wajib pajak tidak mengembalikan SPOP setelah melewati jangka waktu 30 hari setelah diterimanya SPOP.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang telah diselesaikan dan ditanda tangani oleh kepala kantor PBB, kemudian dikirimkan kepada wajib pajak.

Dalam pengiriman SPPT ini juga mempengaruhi motivasi atau dorongan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Pengiriman SPPT melalui kelurahan yang ada di Kecamatan Rambah Hilir, dari petugas kelurahan langsung di berikan kepada wajib pajak.

Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya enam (6) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Jadi, apabila seorang wajib pajak menerima SPPT pada tanggal 1 maret 2012, selambat-lambatnya pada tanggal 31 agustus 2012 ia harus membayar PBB-nya. Tanggal 31 agustus ini disebut juga tanggal jatuh tempo SPPT.

2.9.4 Tata Cara dan Tempat Pembayaran PBB

Dalam proses penerimaan PBB cara dan tempat pembayaran akan mempengaruhi dalam peningkatan pembayarannya, karena cara yang mudah tidak berbelit-belit dan tempat pembayarannya yang terjangkau akan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam hal menghemat waktu dalam pembayaran PBB-nya.

Oleh karena itu sebaiknya tempat pembayaran ini dapat terjangkau oleh wajib pajak dan tidak memakan waktu yang lama untuk sampai ke tempat pembayaran tersebut.

Adapun tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menurut pasal 11 UU No.12 Tahun 1985 sebagai mana telah dirubah dengan UU No.12 Tahun 1994 dan di rubah lagi menjadi UU No. 28 Tahun 2009 dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), surat pelunasan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP) adalah sebagai berikut :

1. Pelunasan/pembayaran pajak berdasarkan SPPT

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya enam (6) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

2. pelunasan/pembayaran pajak berdasarkan SKPKP

Pajak yang terutang berdasarkan SKPKB harus dilunasi selambat-lambatnya satu (1) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak.

3. Pelunasan/pembayaran pajak berdasarkan STP

Pajak Bumi dan Bangunan terutang yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak harus dilunasi selambat-lambatnya satu (1) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak. STP dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak yang tidak melunasi atau kurang membayar pajak terutang dalam SPPT/SKPKB pada saat jatuh tempo.

Sedangkan tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang baik yang tercantum pada, SPPT, SKPKB maupun STP dilakukan di :

1. Bank Pemerintah (Bank Persepsi) kecuali Bank Pembangunan Indonesia dan Bank Tabungan Negara (BTN).
2. Kantor Pos dan Giro.
3. Petugas pemungut yang ditunjuk (*collector*) secara resmi. Petugas yang ditunjuk tersebut harus menyeter hasil penagihan setiap hari ke tempat pembayaran yaitu bank persepsi/Kantor Pos dan Giro.

2.9.5 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Fasilitas Perbankan Elektronik

Dalam rangka memberikan kemudahan pada wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, ditetapkan oleh Dirjen Pajak tentang tatacara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui fasilitas perbankan elektronik (KEP 371/02).

Fasilitas perbankan elektronik adalah fasilitas pelayanan perbankan secara elektronik seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Phone Banking, Internet Banking, atau fasilitas perbankan lainnya. Adapun tempat pembayarannya adalah pada Bank Pemerintah/swasta nasional yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan fasilitas Perbankan Elektronik.

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui fasilitas perbankan elektronik dengan tata cara sebagai berikut:

1. Wajib Pajak mendatangi fasilitas perbankan elektronik dengan membawa data yang lengkap dan benar tentang:
 - a. Nomor Objek Pajak (NOP)
 - b. Tahun pajak, yang menunjukkan periode kewajiban pajak yang akan dibayar.
2. Membuka menu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Mengisi elemen dalam tampilan dengan data sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas secara tepat, lengkap dan benar.
4. Meneliti identitas wajib pajak yang terdiri dari NOP, nama, kelurahan, jumlah PBB yang terutang dan tahun pajak yang muncul pada tampilan, apabila identitas wajib pajak yaang tertera pada tampilan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka proses berikutnya harus dibatalkan dan kembali pada menu sebelumnya untuk mengulang pemasukan data yang diperlukan karena ada kemungkinan terjadi kesalahan pemasukan data yang diperlukan.
5. Mengambil hasil keluaran fasilitas perbankan elektronik yang berupa tanda terima pembayaran PBB yang disertakan dengan STTS.
6. mengecek kebenaran tanda terima pembayaran PBB yang diperoleh.

2.9.6 Pengurangan, Keberatan dan Banding

Dalam penetapan besarnya wajib pajak membayar PBB sering terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan SPPT. Seandainya terjadi kesalahan tersebut wajib pajak dapat mengajukan keberatan, banding, dan pengurangan atas hutang pajaknya yang tertera di dalam SPPT-nya. Bahkan bagi mereka yang tidak sanggup dapat mengajukan keberatan dan karena masalah lain seperti pada lahan pertanian yang tidak produktif.

Petugas pelayanan kantor PBB memberikan kemudahan semudah mungkin bagi wajib pajak dalam melunasi hutang PBB-nya dan seluruh keluhan

yang datang dari wajib mereka selalu akan mencari jalan keluarnya. Dan surat usulan keberatan ini setelah mereka terima, mereka akan memperbaikinya tetapi kalau seandainya wajib pajak yang mengada-ada mereka akan langsung menindaknya dengan sanksi yang telah ditentukan.

Besarnya PBB dapat diminta pengurangan apabila dalam hal :

1. Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, seperti lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan oleh wajib pajak perseorangan, objek pajak yang nilai jualnya meningkat disebabkan karena adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan oleh wajib pajak. Pajak perseorangan yang berpenghasilan rendah, objek pajak yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak perseorangan yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi, objek pajak yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan dan objek pajak yang dimiliki/dikuasai atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah lainnya sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi. Besarnya pengurangan untuk hal-hal tersebut diatas ditetapkan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) oleh

Kepala Kantor Pelayanan PBB berdasarkan pertimbangan yang wajar dan objektif dengan mengingat penghasilan wajib pajak yang besarnya PBB yang terutang.

2. Objek pajak yang terkena bencana alam, seperti gempa bumi, banjir dan tanah longsor dan sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan, wabah penyakit tanaman dan hama tanaman.

Adapun ketentuan tentang keberatan menurut pasal 15 dan 16 UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.12 tahun 1994 dan telah dirubah lagi menjadi UU No.28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Keberatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak hanya kepada Dirjen Pajak atas SPPT dan SKP/
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan secara jelas.
3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimnya SPPT maupun SKP, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
4. Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Dirjen Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.

5. Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.
6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan, jika dalam jangka waktu tersebut telah lewat, Dirjen Pajak belum menerbitkan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan. Isi keputusan atas surat keberatan dapat berupa mengabulkan seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak terutang.

Sedangkan ketentuan banding menurut pasal 17 UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 dan telah di ubah lagi menjadi UU No.28 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

2. Banding diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keberatan dikeluarkan, dengan cara tertulis dalam bahasa Indonesia, mengemukakan alasan-alasan yang jelas dan bukti yang diperlukan dan melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan.

3. Putusan badan peradilan pajak merupakan keputusan akhir dan bersifat tetap.
4. Permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak yang bersangkutan.
5. Apabila pengajuan banding diterima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2% sebulan (maksimal 24 bulan).

2.9.7 Penagihan

Setelah SPPT dikirim kepada Wajib Pajak, dan Wajib Pajak harus melunasi hutang PBB-nya selambat-lambatnya 6 bulan setelah diterimanya SPPT tersebut kalau wajib pajak tetap tidak membayar hutang pajaknya dalam waktu yang telah disediakan oleh KP-PBB maka akan diadakan penagihan atas hutang PBB tersebut.

Pelaksanaan penagihan mereka lakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan yaitu 7 hari setelah jatuh tempo, kalau tidak juga wajib pajak melunasi hutang PBB-nya akan diberikan surat teguran yang berlaku paling lama 21 hari.

Kemudian kalau wajib pajak tidak juga melunasi hutang PBB-nya akan diberikan surat paksa kepada mereka yang hanya berlaku 1 x 24 jam, kalau juga wajib pajak tidak melunasi hutangnya akan diberikan surat perintah melakukan penyitaan. Bahkan mereka mengatakan setelah dikeluarkan surat paksa

berminggu-minggu bahkan sampai hitungan bulan masih diberikan keringanan kepada wajib pajak untuk melunasi hutang PBB-nya.

2.9.8 Sanksi

Wajib Pajak ataupun pejabat yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak, maupun pejabat yaitu :

Bagi Wajib Pajak

1. Karena kelupaannya sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal ini tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak dan menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan tidak benar. Maka sanksi yang diberikan berupa pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda stinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak terutang.
2. Karena kesengajaannya sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Dierjen Pajak, menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan tidak benar, memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, tidak

memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Maka sanksi yang diberikan berupa pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak terutang.

Bagi Pejabat

Sanksi umum dikenakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku anatar lain, peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil, staatsblad 1860 No. 3 tentang peraturan jabatan notaris.

Sanksi khusus dalam hal tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen yang diperlukan dan tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, dipidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000 (dua juta Rupiah).

2.10 Tarif PBB

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 81 Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3)

setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5).

1. Dasar pengenaan pajak

- a. Dasar pengenaan pajak adalah NJOP
- b. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak atas nama menteri keuangan dengan mempertimbangkan pendapat gubernur/ bupati/ walikota (pemerintah daerah) setempat.
- c. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP.
- d. Besarnya presentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomis social.

Pada dasarnya penetapan NJOP (tiga tahun sekali) namun demikian untuk daerah tertentu karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali.

Dalam menetapkan nilai jual, kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak atas nama menteri keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/ Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat serta memperhatikan asas *self assessment*. Yang dimaksud *assessment value* adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani wajib pajak daerah di pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan, khususnya bagi pemerintah daerah, maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya NJKP yaitu :

1. Sebesar 40% dari NJOP untuk:
 - a. Objek pajak perkebunan
 - b. Objek pajak kehutanan
 - c. Objek pajak lainnya, yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dan Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
2. Sebesar 20% dari NJOP untuk:
 - a. Objek pajak pertambangan
 - b. Objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

2.11 Definisi Konsep

Guna mendapat persamaan pengertian tentang konsep-konsep dalam penulisan ini serta untuk menghindari kesalahan penafsiran maka penulis merasa perlu mengemukakan konsep-konsep dan memberikan penjelasan terhadap indicator-indikatornya:

- a. Tingkat pendidikan
- b. Tingkat Pendapatan

- c. Jarak tempat tinggal
- d. Sikap
- e. Penyuluhan
- f. Kejelasan Undang-Undang
- g. Kuantitas dan Kualitas petugas pajak setempat

2.11 Teknik Pengukuran

Agar penelitian menjadi lebih baik dan ilmiah serta diakui kebenarannya maka perlu digunakan suatu pengukuran agar tidak terjadi kesalahan nantinya dilapangan. Dalam teknik pengukuran ini penulis mencoba mengukur melalui variabel-variabel yang ada dalam definisi konsep.

- a. Pendidikan adalah salah satu dari factor yang menentukan tingkat pendapatan dan partisipasi seseorang untuk itu dapat kita lihat ;
 1. Tinggi, apabila pendidikan masyarakat tamatan perguruan tinggi/akademi.
 2. Sedang, apabila pendidikan masyarakat tamatan sekolah lanjutan tingkat atas dan sekolah lanjutan tingkat pertama.
 3. Rendah, apabila pendidikan masyarakat tidak tamat sekolah dan sekolah dasar.

b. Jenis pekerjaan adalah macam-macam pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini khusus jenis pekerjaan wajib pajak, dapat diukur sebagai berikut:

1. Tinggi, apabila 70-100 % jumlah penduduk mempunyai pekerjaan disektor formal.
2. Sedang, apabila 50-69 % jumlah penduduk mempunyai pekerjaan disektor formal.
3. Rendah, apabila jumlah penduduk yang bekerja disektor formal kecil dari 49%.

c. Jarak tempat tinggal adalah jarak yang ditempuh Wajib Pajak untuk mencapai tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, di ukur sebagai berikut :

1. Baik, apabila jarak tempat tinggal tidak mempengaruhi masyarakat untuk membayar pajak.
2. Sedang, apabila jarak tempat tinggal cukup mempengaruhi masyarakat untuk membayar pajak.
3. Rendah, apabila jarak tempat tinggal tidak mempengaruhi masyarakat untuk membayar pajak.

d. Pendataan objek pajak adalah pengukuran objek pajak oleh petugas untuk menentukan seberapa besar jumlah pajak terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak dapat diukur sebagai berikut :

1. Baik, apabila pendataan objek pajak oleh petugas berdasarkan data yang dapat dari lapangan yang benar dan akurat.

2. Sedang. Apabila pendataan objek pajak oleh petugas dimana petugas mendatangi wajib pajak tetapi tidak melakukan pengukuran.
3. Rendah, apabila petugas melakukan pendataan berdasarkan perkiraan semata.

e. Kejelasan Undang-Undang

1. Baik, apabila responden tahu tentang Undang-Undang yang mengatur tentang PBB.
2. Sedang, apabila responden kurang tahu tentang Undang-Undang yang mengatur tentang PBB.
3. Rendah, apabila responden tidak tahu tentang Undang-Undang yang mengatur tentang PBB.

f. Pengiriman SPPT adalah pemberian surat pajak terhutang kepada wajib pajak agar membayar pajak sesuai dengan batas jatuh tempo dapat diukur sebagai berikut :

1. Baik, apabila pengiriman surat pemberitahuan pajak terhutang dilakukan 1 sampai 5 bulan sebelum batas akhir pembayaran pajak atau jatuh tempo.
2. Sedang, apabila pengiriman surat pemberitahuan pajak terhutang dilakukan 6-11 bulan sebelum batas akhir pembayaran pajak atau jatuh tempo.

3. Buruk, apabila pengiriman surat pemberitahuan pajak terhutang dikirim 1 bulan menjelang batas akhir pembayaran pajak atau jatuh tempo.

g. Penyuluhan akan mempengaruhi dari pada kemauan masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak mereka dapat diukur sebagai berikut :

1. Baik, apabila penyuluhan dilakukan atau dilaksanakan dalam setahun berkisar antara 3-4 kali.
2. Sedang, apabila penyuluhan dilakukan oleh petugas dalam setahun 2-3 kali.
3. Buruk, apabila penyuluhan dilakukan oleh petugas dalam setahun 1-2 kali.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian penulis adalah Kecamatan Rambah Hilir yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten rokan Hulu, yang merupakan salah satu kabupaten dari provinsi Riau. Kabupaten rokan hulu terdiri dari 13 kecamatan.

Waktu penelitian ini dilakukan di mulai pada bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.

3.2 Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2005:90).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang bertempat tinggal di Kecamatan Rambah Hilir kabupaten Rokan Hulu yang berjumlah 7210 wajib pajak.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat

menggunakan sampel yang diambil dari populasi. (Sugiyono, 2005:91).

Sedangkan untuk ukuran sampel dari populasi penulis menggunakan rumus Slovin, dimana penetapan sampel mempertimbangkan batas ketelitian yang dapat mempengaruhi kesalahan pengambilan sampel populasi. Rumus Slovin tersebut adalah sebagai berikut ;

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n=ukuran sampel

N=ukuran populasi

e= nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan.

Adapun jumlah populasi dari penelitian ini adalah sebesar 7210, maka dengan besarnya jumlah populasi tersebut dan demi menghemat biaya, tenaga dan waktu yang dilaksanakan dalam penelitian ini maka penulis mengambil sampel dengan batas ketelitian sebesar 10%. Dengan menggunakan rumus Slovin dengan populasi 7210 maka didapatkan sampel sebesar 99, kemudian teknik penarikan sampelnya digunakan cara *proportionate stratified random sampling*, yaitu suatu teknik yang digunakan apabila populasi mempunyai unsur/anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional (Sugiono, 2005: 93)

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden. Responden dari penelitian ini yaitu kepala keluarga yang menjadi wajib pajak yang diambil sebagai sampel dan kemudian data ini dianalisa. Data tersebut diantaranya:

- a. Data tentang responden
- b. Data tentang tingkat pembayaran atau kesedian membayar PBB

2. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui instansi pemerintah yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Data ini berfungsi untuk mempermudah penelitian antara lain data tentang :

- a. Lokasi penelitian
- b. Keadaan wilayah, penduduk dan tingkat pendidikan masyarakat.
- c. Keadaan saran dan prasarana.
- d. Data sekunder lainnya yang dianggap perlu dan berguna bagi penelitian ini.

3.4 Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Yaitu teknik pengamatan langsung oleh penulis dengan melihat dari dekat gejala-gejala yang ada di lapangan yang menjadi objek penelitian penulis.

2. Interview

Yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada responden untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah penelitian.

3. Kuesioner

Yaitu dengan membuat daftar pertanyaan (angket) yang disusun secara tertulis dan diajukan kepada responden untuk mendapatkan jawaban data yang dicari.

3.5 Analisa Data

Dalam menganalisa data yang penulis peroleh baik data primer maupun data sekunder. Penulis mempergunakan teknik deskriptif kualitatif yakni analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan di lapangan mengenai partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Karakteristik Wilayah

Kecamatan Rambah Hilir adalah salah satu dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Luas wilayah Kecamatan Rambah Hilir 310,31 km dan memiliki 13 desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tambusai
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rambah dan Rambah Samo
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kepenuhan Hulu
4. Sebelah barat berbatsan dengan Kecamatan Bangun Purba.

4.2 Keadaan Demografi

1. Jumlah Penduduk Kecamatan Rambah Hilir

Penduduk merupakan unsur yang paling penting dalam pembangunan, baik sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan ketetapan tersebut berarti bahwa aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakkan dalam proses pembangunan.

Penduduk dalam wilayah Kecamatan Rambah Hilir pada tahun 2012 berjumlah 32.345 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Rambah Hilir

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Wanita	
1	Rambah Hilir	1426	1496	2922
2	R.H. Tengah	942	1003	1945
3	R.H. Timur	893	832	1725
4	Pasir Utama	1986	2013	3999
5	Pasir Jaya	1385	1364	2749
6	Rambah Muda	1801	1766	3567
7	Sungai Sitolang	1103	1057	2160
8	Lubuk Kerapat	835	811	1646
9	Rambah	2267	2315	4582
10	Serombou Indah	895	856	1751
11	Sei. Dua Indah	604	570	1174
12	Muara Musu	1172	1166	2338
13	Sejati	773	1014	1787
Jumlah		16082	16263	32345

Sumber: Kantor Camat Rambah Hilir, 2012

Tabel diatas tersebut memperlihatkan jumlah penduduk di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu menurut jenis kelamin yang mana wanita lebih banyak jumlahnya dari pada jenis kelamin laki-laki.

2. Penduduk menurut tingkat pendidikan

Faktor tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam era pembangunan sekarang ini. Berkualitasnya mutu pendidikan masyarakat akan

membawa dampak yang sangat positif terhadap kemajuan dalam wilayah kecamatan tersebut.

Beberapa tahun belakangan ini dapat dilihat bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Kecamatan Rambah Hilir akan pentingnya pendidikan. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan penduduk wilayah Kecamatan Rambah Hilir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kecamatan Rambah Hilir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tamat SD/MI	3645	11,27
2	Tamat SMP/MTS	12567	38,85
3	Tamat SLTA	9861	30,47
4	Tamat Diploma	1056	3,27
5	Tamat S1/S2	987	3,1
6	Lain-lain	4229	13,1
Jumlah		32345	100

Sumber: Kantor Camat Rambah Hilir, 2012

Dari tabel IV.2 tersebut diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Rambah Hilir sudah bisa dikatakan baik, dimana di Kecamatan Rambah Hilir secara mayoritas telah mengenyam pendidikan formal walaupun sebagian besar penduduk hanya sampai tingkat SLTP. Dari tabel IV.2 dapat diketahui bahwa terdapat 3645 (11,27%) penduduk tamatan SD/MI, kemudian 12567 orang (38,85%) tamatan SLTP, 9861 (30,47%) menamatkan SLTA, 1056 (3,27%) menamatkan diploma, 987 (3,1%) menamatkan S1, dan dalam kaategori lain-lain terdapat 4229 (13,1%).

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Kecamatan Rambah Hilir. Pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana yang memadai. Pada umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah yang ada di Kecamatan Rambah Hilir boleh dikatakan hampir seluruhnya tersedia. Prasarana pendidikan yang tersedia sudah dapat dikatakan telah mencukupi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jumlah gedung-gedung sekolah yang telah mampu untuk menampung sebagian besar penduduk Kecamatan Rambah Hilir pada usia sekolah.

Keadaan yang telah disebut diatas ditunjang dengan adanya prasarana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Untuk mengetahui jumlah prasarana pendidikan di Kecamatan Rambah Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.3 : Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Rambah Hilir

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD/MI	30	65,22
2	SMP/MTS	10	21,3
3	SLTA	5	10,9
4	Perguruan Tinggi	1	2,17
Jumlah		46	100

Sumber: Kantor Camat Rambah Hilir, 2012

Dari tabel IV.3 diatas ditunjukkan bahwa prasarana pendidikan yang paling banyak adalah SD/MI sebanyak 30 buah (65,22%), berikutnya adalah prasarana gedung SLTP sebanyak 10 (21,3%), kemudian 5 buah (10,9%) prasarana gedung SLTA, dan terakhir terdapat 1 buah Perguruan Tinggi (2,17%).

4. Mata Pencarian Penduduk

Adapun bentuk mata pencarian atau jenis pekerjaan penduduk yang ada di Kecamatan Rambah Hilir mayoritas mata pencarian penduduk adalah petani untuk lebih jelasnya mengenai mata pencarian penduduk Kecamatan Rambah Hilir dapat dilihat ditabel berikut ini :

Tabel IV.4 : Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian di Kecamatan Rambah Hilir

No	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase
1	Petani	9765	30,19
2	Nelayana/Perikanan	201	0,62
3	Buruh	7460	23,06
4	PNS/Honoror	1005	3,11
5	Pedagang	342	1,06
6	Wiraswasta	1303	4,03
7	TNI/Polri	20	0,07
8	Lain-lain	12249	37,88
Jumlah		32345	100

Sumber: Kantor Camat Rambah Hilir, 2012

Dari tabel IV.4 diatas dapat diketahui bahwa dari sekian banyak jumlah penduduk Kecamatan Rambah Hilir terdapat 9765 orang (30,19%) petani, 201 orang (0,62%) sebagai nelayan, 7460 orang (23,06%) sebagai buruh, 1005 orang (3,11%) PNS/Honoror, 342 orang (1,06%) bekerja sebagai pedagang, kemudian 1303 orang (4,03%) sebagai wiraswasta, selanjutnya 20 orang (0,07%) sebagai TNI/Polri dan terakhir 12249 orang (37,88%) di kategorikan kedalam lain-lain.

5. Kehidupan Keagamaan

Memeluk agama merupakan hak azasi dasar dari pada manusia. Kebebasan beragama di negara Republik Indonesia di jamin dalam batang tubuh UUD 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama., kerukunan umat beragama tidak mencampur adukkan kepercayaan.

Dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang ditangani falsafah negara pancasila, dikenal ada tiga kerukunan beragama itu adalah :

1. Kerukunan umat beragama dengan seagama.
2. Kerukunan umat beragama dengan agama lain.
3. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Untuk melihat pemeluk agama yang tumbuh dan berkembang di Kecamatan Rambah Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.5 : Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Rambah Hilir

No	Pemeluk Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	26809	82,9
2	Budha	-	
3	Protestan	2458	7,6
4	Katolik	3078	9,5
5	Hindu	-	
6	Konghucu	-	
Jumlah		32345	100

Sumber: Kantor Camat Rambah Hilir, 2012

Dari tabel IV.5 diatas memperlihatkan bahwa pemeluk agama mayoritas adalah beragama islam yaitu sebanyak 26809 orang (82,9%), sedangkan minoritas adalah protestan dan katolik yaitu protestan 2458 orang (7,6%) dan katolik 3078 orang (9,5%).

Untuk menjalankan ritual kepada Tuhan Yang Maha Esa, sangat perlu didukung oleh sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana ritual adalah tempat peribadatan. Dimana tempat peribadatan ini selain dari tempat ibadah juga merupakan salah satu saluran yang penting untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan dalam rangka mensosialisasikan suatu pembangunan kepada masyarakat. Banyaknya tempat ibadah di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.6 : Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Rambah Hilir

No	Sarana Ibadah	Jumlah	Persentase
1	Masjid	52	50,99
2	Mushola	35	34,31
3	Gereja	15	14,71
4	Vihara	0	0
5	Pura	0	0
Jumlah		102	100

Sumber: Kantor Camat Rambah Hilir, 2012

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 52 masjid dan 35 mushola sebagai sarana umat islam untuk beribadah, 15 gereja sebagai sarana ibadah bagi umat kristen dan katolik.

4.3 Struktur Pemerintahan

1. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan

Pelaksanaan pemerintahan wilayah Kecamatan Rambah Hilir telah melaksanakan atau menerapkan pola maksimal, berdasarkan peraturan daerah No. 09 tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja kecamatan Kepenuhan Hulu, Kepenuhan, Rambah Hilir, dan Rambah, maka Kecamatan Rambah Hilir telah ditunjuk menjadi kecamatan dengan Pola Organisasi Maksimal perihal yang sama, telah diusulkan pegawai yang akan menduduki jabatan yang tersedia dalam pola organisasi maksimal dimaksud.

Kecamatan Rambah Hilir merupakan salah satu dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari 13 desa sebagai mana yang telah di uraikan diatas. Adapun mengenai struktur organisasi dari pemerintahan Kecamatan Rambah Hilir dapat dilihat pada bagan berikut ini ;

2. Tugas dan Fungsi Camat

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota, dibentuk wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Kecamatan sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Membina Pemerintahan Desa/Kelurahan.
2. Melaksanakan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan dan pembinaan.
4. Menyusun rencana pembangunan diwilayah Kerja Kecamatan.

3. Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan.

Dalam menjalankan tugasnya Camat dibantu oleh perangkat kecamatan yang bertanggung jawab pada Camat. Adapun tugas dan fungsi perangkat Kecamatan yaitu :

a. Sekretaris Kecamatan

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan memberikan

pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan.

2. untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaannya.
- b. Mengurus dan Melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

b. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan membina pemerintahan umum, Kependudukan, dan Catatan Sipil.

- b. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang merupakan wewenang kecamatan.
- c. Memberikan pelayanan, rekomendasi dan perizinan.
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan.
- e. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Pemerintah mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
 - b. melakukan koordinasi dalam membina kesatuan Pelindung Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerja kecamatan.
 - c. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan

kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.

2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Membina kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait.
- c. Melakukan pengawasan, pembinaan, dan memfasilitasi kegiatan program kesehatan masyarakat.
- d. Mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.
- e. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

e. Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.

2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan tugas penganggulan masalah sosial.

- b. Melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana alam.
- c. Melaksanakan koordinasi pembinaan kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
- d. Melaksanakan tugas lain yang ditugas oleh pimpinan.

f. Seksi Lingkungan Hidup

1. Seksi Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi, dan pelaporan urusan lingkungan hidup.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Melakukan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.
 - b. Melakukan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Sebelum pembahasan ini dilanjutkan, ada baiknya dipaparkan identitas responden yang dimaksud guna lebih mengidentifikasi penelitian, sebab tanpa adanya upaya pengenalan terhadap objek atau sasaran yang diteliti maka pengkajian tidak akan berhasil sesuai harapan, apalagi yang menyangkut klasifikasi persepsi dari objek yang akan diteliti, sehingga sangat perlu di adakan pengidentifikasiannya melalui tingkat pendidikan, tingkat umur dan jenis pekerjaan.

5.1.1 Tingkat Pendidikan

Sepanjang sejarah perkembangan dunia yang bersifat dinamis ini, faktor pendidikan menjadi kemutlakan yang harus diperhatikan dengan seksama oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal usia. Artinya tuntutan akan pendidikan senantiasa menempati posisi teratas dalam kriteria pencapaian suatu kualitas dan produktivitas yang baik.

Sehubungan dengan upaya meningkatkan penerimaan sektor perpajakan bagi mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, maka konsekuensi tingkat pendidikan yang memadai harus dimiliki oleh masyarakat sebagai wajib pajak

karena dengan pendidikan yang memadai akan turut menciptakan kelancaran dalam membayar pajak.

Di sisi lain, pendidikan tidak hanya menjadi tuntutan terhadap aparat/petugas kolektor melainkan menjadi keharusan setiap individu masyarakat sebagai wajib pajak, yang bermakna seperangkat pengetahuan dan pemahaman yang berorientasi pada pendidikan formal supaya apa yang menjadi kewajibannya dapat dipenuhi dengan baik termasuk pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui lebih jelas tingkat pendidikan yang dimiliki oleh responden penelitian dari unsur-unsur masyarakat wajib pajak di Kecamatan Rambah Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1 : Keadaan Tingkat Pendidikan Responden Penelitian di Kecamatan Rambah Hilir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tamatan SD	22	22,22
2	Tamatan SLTP	29	29,29
3	Tamatan SLTA	29	29,29
4	Tamatan Perguruan Tinggi/Akademi	19	19,19
Jumlah		99	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2012

Tabel V.1 diatas memperlihatkan tingkat pendidikan responden penelitian, yakni terdapat 22 responden (22,22%) yang berbekal pendidikan SD, kemudian terdapat pula 29 responden (29,29%) dengan bekal pendidikan SLTP, sebanyak 29 responden (29,29%) dengan pendidikan SLTA dan selebihnya 19 responden (19,19%) yang sudah mencapai jenjang pendidikan tinggi yaitu sarjana dan diploma.

5.1.2 Kelompok Umur

Disamping tingkat pendidikan tersebut, identifikasi responden penelitian dapat ditinjau dari tingkat umur yang dimiliki karena konsepsi umur merupakan faktor yang turut mempengaruhi cara berfikir dan bertindak seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari.

Hal ini logis sekali bahwa kematangan pola pikir dalam usia seorang masyarakat wajib pajak sangat mewarnai penguasaan dan pemahaman atas berbagai sistem dan prosedur yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, karena dengan pemahaman itulah kewajiban pembayaran pajak dapat dipenuhi oleh wajib pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan setiap tahunnya.

Untuk mengetahui lebih jelas tingkat umur responden penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.2 : Keadaan Kelompok Umur Responden Penelitian di Kecamatan Rambah Hilir

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	26-35 Tahun	56	56,56
2	36-45 Tahun	35	35,35
3	46-55 Tahun	7	7,1
4	56 Tahun keatas	1	1,01
Jumlah		99	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2012

Tabel V.2 diatas memperlihatkan kelompok umur responden penelitian, yakni terdapat 56 responden (56,56%) yang berumur antara 26-35 tahun, kemudian terdapat pula 35 responden (35,35%) yang berumur 36-45 tahun,

sebanyak 7 responden (7,1%) yang berumur antara 46-55 tahun, dan hanya 1 responden (1,01%) yang berumur 56 tahun ke atas.

5.1.3 Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperoleh rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pekerjaan erat hubungannya dengan keadaan sosial ekonomi dan akan menentukan perilaku individu dalam kehidupannya sehari-hari.

Untuk mengetahui lebih jelas jenis pekerjaan responden penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.3 : Jenis Pekerjaan Responden Penelitian di Kecamatan Rambah Hilir

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani	29	29,3
2	Nelayan	5	5,1
3	Buruh	12	12,12
4	PNS/Honorar	19	19,2
5	Pedagang	15	15,2
6	Wiraswasta	19	19,2
Jumlah		99	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, tahun 2012

Tabel V.3 diatas memperlihatkan mata pencaharian responden penelitian, yakni terdapat 29 responden (29,3%) yang bekerja sebagai petani, kemudian terdapat 5 responden (5,1%) yang bekerja sebagai nelayan, sebanyak 12 responden (12,12%) yang bekerja sebagai buruh, 19 responden (19,2%) yang

bekerja sebagai PNS/Honorer, 15 responden (15,2%) bekerja sebagai pedagang, dan selebihnya 19 responden (19,2%) bekerja sebagai wiraswasta.

5.2 Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

5.2.1 Jumlah responden yang Membayar PBB

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat Kecamatan Rambah Hilir dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tercermin dari jumlah responden yang telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

Dari informasi yang telah diperoleh, pada umumnya masyarakat yang membayar PBB pertama karena PBB tersebut adalah merupakan hal yang wajib harus dibayar, kedua jumlahnya menurut mereka sesuai dengan luas tanah dan bangunan yang mereka miliki dan terakhir mereka memang sudah menyediakan anggaran pengeluaran untuk pembayaran PBB.

Untuk mengetahui lebih jelas jumlah responden yang membayar PBB dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.4 : Jumlah Responden yang Membayar PBB di Kecamatan Rambah Hilir Tahun 2010-2012

No	Tahun	Jumlah Membayar	Jumlah Menunggak	Jumlah	Persentase
1	2010	62	37	99	62,6
2	2011	72	27	99	72,7
3	2012	66	33	99	66,7
Jumlah		67	32	99	67,7

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2012

Dari tabel V.4 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terjadi naik turun dalam membayar PBB, di mana pada tahun 2010 terdapat 62 (62,6%) dari responden yang membayar PBB, pada tahun 2011 pula terdapat 72 (72,7%) dari responden yang membayar PBB dan terakhir pada tahun 2012 terdapat 66 (66,7%) responden yang membayar PBB, sehingga secara rata-rata 67 (67,7%) dari seluruh responden adalah membayar PBB yang setia.

5.2.2 Tingkat Kelancaran Membayar PBB

Tingkat kelancaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan salah satu indikator adalah semakin lancar membayar berarti semakin jarang menunggak. Untuk itu kepada responden ditanyakan tentang jumlah menunggak membayar Pajak Bumi dan Bangunan selama tiga tahun belakangan ini. Jika dilihat rata-rata yang menunggak selama tiga tahun belakangan terdapat 33 dari responden yang menunggak.

Dari informasi yang diperoleh faktor-faktor responden menunggak membayar PBB adalah sebab karena PBB tersebut tidak sesuai dengan keadaan bumi dan bangunan yang dimiliki, tempat pembayar yang jauh dan jumlah yang dibayar sangat kecil.

Untuk melihat kelancaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada responden dapat diketahui pada tabel dibawah ini :

Tabel V.5 : Jumlah Penunggakan Pembayaran PBB oleh Responden di Kecamatan Rambah Hilir Tahun 2010-2012

No	Frekuensi Tunggakan	Jumlah Responden	Persentase
1	1 kali	53	53,5
2	2 kali	17	17,2
4	Tidak Pernah	29	29,3
Jumlah		99	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2012

Dari tabel V.5 tersebut diatas dapat diuraikan bahwa tingkat kelancaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilihat dari frekuensi tunggakan pada responden, ternyata 70 atau 70,7% dari responden pernah menunggak pembayaran PBB dan 29 atau 29,3% responden tidak pernah menunggak. 17 atau 17,2% dari responden menunggak 2 kali, dan 53 atau 53,5% responden menunggak 1 kali.

5.2.3 Tingkat Disiplin Membayar PBB

Bagi responden yang tidak pernah menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, ini berarti responden atau Wajib Pajak mempunyai disiplin yang tinggi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tiap tahun.

Namun demikian perlu diketahui tingkat disiplin tersebut berdasarkan kapan mereka membayar Pajak Bumi dan Bangunan setelah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Ada tiga kategori waktu membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu membayar pada waktu yang lebih awal setelah menerima SPPT, membayar pada

pertengahan tahun setelah menerima SPPT dan membayar pada waktu akhir tahun atau hampir jatuh tempo setelah menerima SPPT.

Untuk melihat tingkat disiplin responden dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah Hilir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.7 : Tingkat Disiplin Responden Membayar PBB di Kecamatan Rambah Hilir

No	Waktu Pembayaran PBB	Jumlah Responden	Persentase
1	< 1 bulan setelah menerima SPPT	17	17,2
2	1-6 bulan setelah menerima SPPT	45	45,5
3	lebih dari 6 bulan setelah menerima SPPT	37	37,4
Jumlah		99	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2012

Jika dilihat dari tabel V.7 di atas diketahui bahwa terdapat 17 responden (17,2%) membayar PBB dengan tingkat disiplin tinggi yaitu kurang dari satu bulan setelah menerima SPPT dan 45 responden (45,5%) membayar PBB dengan tingkat disiplin sedang yaitu membayar pada satu sampai enam bulan setelah menerima SPPT, kemudian terakhir terdapat 37 (37,4%) dari responden membayar PBB dengan tingkat disiplin rendah yaitu membayar pada waktu lebih dari enam bulan setelah menerima SPPT.

5.2.4 Tingkat Pelayanan Pembayaran PBB

Tingkat pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor rangsangan responden atau Wajib Pajak dalam disiplin membayar Pajak Bumi dan Bangunan, apabila wajib pajak mempunyai dasar atau pengalaman dalam

membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan pelayanan yang baik, mudah, cepat dan aman, maka tingkat partisipasi pembayaran akan dapat dipertahankan.

Sebaliknya apabila pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tersebut buruk, susah, lambat dan tidak aman, maka responden sebagai wajib pajak akan enggan membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada waktu yang tepat, bahkan mungkin di undur-undur atau menunggak sama sekali.

Untuk itu kepada responden tingkat pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dibagi atas tiga kategori yaitu pelayanan yang baik, cukup baik, dan kurang baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.8 : Tingkat Pelayanan Pembayaran PBB

No	Tingkat Pelayanan Pembayaran PBB	Jumlah Responden	Persentase
1	Baik	12	12,1
2	Cukup Baik	56	56,6
3	Kurang Baik	31	31,3
Jumlah		99	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2012

Dari tabel V.8 terlihat, 12 responden (12,1%) dari responden mengatakan bahwa pelayanan pembayaran PBB baik, dan 56 (56,6%) dari responden mengatakan bahwa pelayanan pembayaran PBB cukup baik, kemudian 31 (31,3%) dari responden mengatakan pelayanan pembayaran PBB kurang baik.

Dilihat dari hasil jawaban responden terhadap pelayanan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan hanya 12 responden yang menjawab pelayanan baik, selebihnya responden menjawab cukup baik dan kurang baik, jadi menurut

pengamatan penulis pelayanan merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

5.2.5 Frekuensi Penyuluhan PBB

Frekuensi penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor rangsangan bagi responden atau Wajib Pajak dalam berpartisipasi dan disiplin membayar Pajak Bumi dan Bangunan, apabila wajib pajak mempunyai dasar, pengalaman, dan pengetahuan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan meningkat.

Penyuluhan wajib pajak adalah pemberian pengetahuan kepada wajib pajak agar lebih mengerti tentang arti dan fungsi pajak. Untuk melihat tingkat penyuluhan yang dilakukan kolektor atau aparat pemerintahan tentang Pajak Bumi dan Bangunan dalam satu tahun di Kecamatan Rambah Hilir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.9 : Frekuensi Penyuluhan PBB di Kecamatan Rambah Hilir

No	Frekuensi Penyuluhan PBB	Jumlah Responden	Persentase
1	1 kali	16	16,2
2	2 kali	0	0
3	tidak pernah	83	83,8
Jumlah		99	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2012

Dari tabel V.9 diatas diketahui bahwa 16 (16,2%) dari responden mengatakan bahwa hanya 1 kali pihak perpajakan atau kolektor/petugas PBB

melakukan penyuluhan, dan 83 (83,8%) dari responden mengatakan bahwa tidak pernah dilakukan penyuluhan oleh pihak perpajakan atau kolektor/petugas.

Jika dilihat dari frekuensi penyuluhan yang diberikan oleh pihak aparat pajak/petugas pajak hanya 16 responden yang menjawab pernah dilakukannya penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah Hilir. Data ini didukung oleh hasil wawancara penulis di lapangan kepada responden bahwa hanya di Kecamatan di lakukannya penyuluhan, jadi Wajib Pajak yang bertempat tinggal jauh dari kecamatan tidak pernah mengetahui diadakannya penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

5.2.6 Manfaat PBB yang Dirasakan Masyarakat

Salah satu faktor dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah sejauh mana uang yang sudah dibayar masyarakat itu dapat dimanfaatkan kembali kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini ditanyakan manfaat yang telah dirasakan dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas umum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.10 : Jawaban Responden Tentang Manfaat PBB Bagi Masyarakat di Kecamatan Rambah Hilir

No	Manfaat PBB yang di Rasakan	Jumlah Renponden	Persentase
1	Bermanfaat	12	12,1
2	Cukup Bermanfaat	49	49,5
3	Tidak Bermanfaat	38	38,4
Jumlah		99	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2012

Dari tabel V.10 diatas terdapat 12 (12,1%) responden mengatakan PBB bermanfaat bagi masyarakat dan 49 (49,5%) responden mengatakan PBB cukup bermanfaat kemudian terakhir terdapat 38 (38,4%) dari responden menatakan PBB tidak bermanfaat.

Jika dilihat dari sisi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari membayar Pajak Bumi dan Bangunan, masyarakat masih tidak merasakan manfaatnya. Ini di sebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat pembangunan apa saja yang dihasilkan dari uang pembayaran pajak tersebut.

5.2.8 Jarak Tempat Tinggal

Dalam penelitisn ini juga di tanyakan apakah jarak tempat tinggal Wajib Pajak dengan tempat pembayaran pajak juga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hal ini karenakan mengingat bahwa Kecamatan Rambah Hilir terdiri dari desa-desa yang kases jalan menuju keluar desa masih sangat tidak memadai (*hasil observasi lapangan, 2012*). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.11 : Jawaban Responden Tentang Pengaruh Jarak Tempat Tinggal di Kecamatan Rambah Hilir

No	Pengaruh jarak tempat tinggal	Jumlah Renponden	Persentase
1	Mempengaruhi	31	31,3
2	Cukup mempengaruhi	65	65,7
3	Tidak mempengaruhi	3	3,3
Jumlah		99	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2012

Dari tabel V.11 diatas terdapat 31 (31,3%) responden mengatakan jarak tempat tinggal mempengaruhi responden dalam berpartisipasi membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan 65 (65,7%) responden mengatakan cukup mempengaruhi, kemudian terakhir terdapat 3 (3,3%) dari responden mengatakan tidak mempengaruhi.

5.2.9 Pengetahuan Masyarakat Tentang UU PBB

Tabel V.12 : Jawaban Responden Tentang Pengatahuan UU yang mengatur PBB di Kecamatan Rambah Hilir

No	Pengetahuan tentang UU PBB	Jumlah Renponden	Persentase
1	Tahu	5	5,5
2	Kurang Tahu	33	33,3
3	Tidak tahu	61	61,6
Jumlah		99	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2012

Dari tabel V.12 diatas terdapat 5 (5,5%) responden menjawab tahu tentang Undang-Undang yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan 33 (33,3%) responden menjawab kurang tahu, kemudian terakhir terdapat 61 (61,6%) dari responden mengatakan tidak mengetahui sama sekali tentang Undang-Undang yang mengatur PBB.

5.3 Usaha-Usaha Yang di Lakukan Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Sehubungan dengan kendala-kendala yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat di dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga

pihak Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKA) Kabupaten Rokan Hulu mengupayakan beberapa hal :

1. Memasang spanduk dan baliho yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan dan tempat-tempat umum lainnya yang sifatnya strategis dan mudah diperlihatkan kepada masyarakat.
2. Membuat papan nama proyek yang bertuliskan bahwa pembangunan yang dilakukan di daerah adalah berasal dari masyarakat yang telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan rutin.
3. Mengadakan undian-undian berhadiah bagi desa-desa atau kecamatan yang menyetorkan pajak 100% dan memberikan piagam penghargaan.
4. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang arti pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dimana penyuluhan yang dilakukan ini kerjasama dengan pihak kecamatan. *(hasil wawancara di lokasi penelitian, 2012).*

Dari keseluruhan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan **Cukup baik/sedang**, sebab dari semua pertanyaan yang peneliti ajukan di dalam angket rata-rata menjawab negatif. Adapun faktor yang paling mempengaruhi adalah frekuensi penyuluhan yang dilakukan pihak kolektor/

petugas pajak terdapat 83,8% responden menjawab tidak pernah dilakukannya penyuluhan didesa-desa.

BAB VI

PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang telah penulis laksanakan, dari kesimpulan tersebut penulis memberikan beberapa saran yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB.

6.1 Kesimpulan

1. Bahwa secara kuantitas partisipasi masyarakat di Kecamatan Rambah Hilir dalam membayar PBB cukup baik yaitu selama tiga (3) tahun rata-rata 67,7 % dan seluruh masyarakat yang terwakili (responden) sebagai subjek PBB.
2. Bahwa tingkat kelancaran pembayaran PBB di Kecamatan Rambah Hilir ternyata cukup lancar yaitu 33 dari masyarakat yang terwakili (responden) tidak pernah menunggak PBB.
3. Tingkat disiplin membayar PBB di Kecamatan Rambah Hilir ternyata sebagian besar responden 45,5% membayar 1-6 bulan setelah menerima SPPT.
4. Tingkat pelayanan pembayaran PBB di kecamatan Rambah Hilir 56,6% dari masyarakat yang terwakili menyatakan cukup baik, dan yang menyatakan baik 12,1% baik dan 31,3% menyatakan kurang baik.

5. Frekuensi penyuluhan yang dilakukan pihak perpajakan atau kolektor/petugas PBB atau kantor pelayanan PBB ternyata kurang baik dimana 83,8% dari responden menyatakan tidak pernah ada penyuluhan, dan 16,2% menyatakan hanya 1 kali dilakukan penyuluhan dalam satu tahunnya.
6. Terdapat 49,5% responden menyatakan uang yang dibayar untuk PBB cukup bermanfaat untuk pembangunan sarana dan prasarana, 38,4% menyatakan tidak bermanfaat dan hanya 12,1% menyatakan bermanfaat.
7. Terdapat 65,7% responden menjawab bahwa jarak tempat tinggal mempengaruhi responden dalam membayar pajak.
8. Pengetahuan responden terhadap Undang-Undang yang mengatur tentang Pajak kurang baik di mana 61,6% responden menjawab tidak tahu tentang UU tersebut.

6.2 Saran

1. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar PBB di Kecamatan Rambah Hilir hendaklah dalam menetapkan besarnya jumlah yang akan dibayar (pajak terutang) data selalu akurat oleh karena itu Kantor Pelayanan PBB, dirasakan perlu mendata ulang setiap tahun objek pajak yang di miliki oleh masyarakat.
2. Perlu diadakan penyuluhan secara periodik oleh kantor pelayanan PBB untuk meningkat wawasan pengetahuan masyarakat tentang

pentingnya membayar PBB, tentang cara menetapkan nilai objek pajak, pembayaran, pengurangan keberatan dan banding serta sanksi-sanksi PBB.

3. Perlu ditingkatkan penggunaan PBB untuk kepentingan masyarakat khususnya dalam membangun sarana dan prasarana masyarakat dengan mencantumkan papan nama proyek yang bersumber dari dana PBB.
4. Diharapkan kesadaran dan peran serta masyarakat serta tanggung jawab akan kewajibannya dalam membayar PBB.
5. Diharapkan instansi yang terkait dalam pemberian pelayanan PBB di Kecamatan Rambah Hilir dapat terkoordinir dengan baik, dengan harapan tujuan dapat tercapai sebagaimana mestinya.
6. Pelaksanaan prosedur pemungutan PBB diharapkan sesuai dengan prosedurnya guna mempercepat penyampaian informasi tentang pajak teutang pada Wajib Pajak di Kecamatan Rambah Hilir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Astuti, Dwiningrum, Siti, Irene, 2011, *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Davis, Keith, Newstrom, John, 1996, *Perilaku Dalam Organisasi*, Erlangga, Jakarta.
- Fitriandi ,Primandita, Birowo ,Tejo, Aryanto Yuda, 2009, *Undang-Undang Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Gusfahmi , 2007, *Pajak Menurut Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ishak, 2010, *Posisi Politik Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah*, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
- Mardiasmo, 2008, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardikanto, 1997, *Petunjuk Penyuluhan*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Pangabeian, 1999, *Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Hutan Desa*, Usu Medan, Medan.
- Pasaribu, Simandjuntak, 1985, *Sosiologi Pembangunan*, Tarsito, Bandung.
- Riwu, Kaho, Josef, 1988, *Prospek Otonomi Daerah Dinegara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siagian, P. Sondang, 2000, *Administrasi Pembangunan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Setiawan, Agus, Musri , Basri, 2006 , *Perpajakan Umum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sukirno, Sadono, 2006, *Ekonomi Pembangunan*, Pernada Media Group, Jakarta.
- Suparmoko, 2005, *Keuangan Negara*, D.Bpfe-Yogyakarta, Yogyakarta
- Zain, Mohammad, 2007, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan dan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No.32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintah Daerah*

Undang-Undang No.12 Tahun 1985, *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*

Undang-Undang No.12 Tahun 1994, *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, *Tentang Pajak Dan Retrebusi Daerah*

Non Buku

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lankip) Dpka Rokan Hulu, 2009.